



2025



STANDAR KEUANGAN

**Universitas Muhammadiyah
Pekajangan Pekalongan**



BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN
UMPP

SK. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 660/KEP/I.0/D/2023

Jalan Raya Pekajangan No. 1A Kab. Pekalongan Telp. (0285) 7832294 website: www.umpp.ac.id email: admin@umpp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN
Nomor: 006/BPH/KEP/B/2025

Tentang :
PENETAPAN STANDAR MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan:

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya pengendalian dan peningkatan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sangat penting dilakukan di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan diperlukan adanya standar mutu
- b. bahwa untuk mencapai hal tersebut, diperlukan adanya aturan dasar untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
- c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan dari Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan tentang Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
- Mengingat** : 1. Aturan Dasar (AD) Muhammadiyah
2. Aturan Rumah Tangga (ART) Muhammadiyah
3. Statuta Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
- Berdasarkan** : 1. Usulan Permohonan SK Manual Mutu Universitas UMPP
No. 151/LPM-01/UMPP/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025
2. Rapat Koordinasi Badan Pembina Harian tanggal 9 Desember 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN TENTANG STANDAR MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN
- Pertama** : Mengesahkan Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Demikian Surat Keputusan ini disampaikan dapat digunakan dengan sebaik – baiknya.

Ditetapkan di : Pekajangan
Pada tanggal : 19 Jumadil Akhir 1447 H
10 Desember 2025 M

Ketua

Dr. H. Imam Suraji, M.Ag.

Badan Pembina Harian (BPH)
Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan



Sekretaris

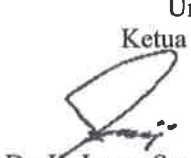
H. Abdul Shomad, SE

*Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah
Pekalongan Pekalongan
Nomor: 006/BPH/KEP/B/2025 tanggal 10 Desember 2025 M*

No	Standar	Nama Standar	Nomor Standar
1	Standar Pendidikan	Standar Luaran Pendidikan	UMPP/BPH/STD/03/001/R4
2		Standar Proses Pendidikan	UMPP/BPH/STD/03/002/R4
3		Standar Masukan Pendidikan	UMPP/BPH/STD/03/003/R4
4	Standar Penelitian	Standar Luaran Penelitian	UMPP/BPH/STD/03/004/R4
5		Standar Proses Penelitian	UMPP/BPH/STD/03/005/R4
6		Standar Masukan Penelitian	UMPP/BPH/STD/03/006/R4
7	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	UMPP/BPH/STD/03/007/R4
8		Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	UMPP/BPH/STD/03/008/R4
9		Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	UMPP/BPH/STD/03/009/R4
10	Standar Tambahan Perguruan Tinggi	Standar Jati diri	UMPP/BPH/STD/03/010/R4
11		Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah	UMPP/BPH/STD/03/011/R4
12		Standar Tata pamong, Tata kelola dan Penjaminan Mutu	UMPP/BPH/STD/03/012/R4
13		Standar Sumber Daya Manusia	UMPP/BPH/STD/03/013/R4
14		Standar Kerjasama	UMPP/BPH/STD/03/014/R4
15		Standar Kemahasiswaan dan Alumni	UMPP/BPH/STD/03/015/R4
16		Standar Keuangan	UMPP/BPH/STD/03/016/R4
17		Standar Sistem Informasi	UMPP/BPH/STD/03/017/R4
18		Standar Kesejahteraan	UMPP/BPH/STD/03/018/R4
19		Standar Sarana dan Prasarana	UMPP/BPH/STD/03/019/R4
20		Standar Humas dan Kesekretariatan	UMPP/BPH/STD/03/020/R4

Badan Pembina Harian (BPH)
Universitas Muhammadiyah Pekalongan Pekalongan

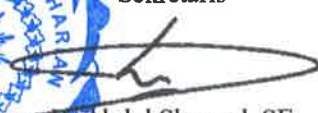
Ketua



Dr. H. Imam Suraji, M.Ag.



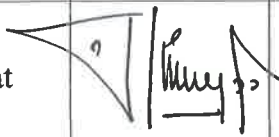
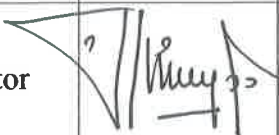
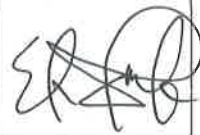
Sekretaris

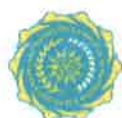


H. Abdul Shomad, SE

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	Kode/No	UMPP/BPH/STD/03/016/R4
		Tanggal	9 Desember 2025/ 18 Jumadil Akhir 1447 H
	STANDAR KEUANGAN	Revisi	4

STANDAR KEUANGAN

NO	PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Perumusan	Sobrotul Intikhanah, S.E., M.Si	Wakil Rektor II		25 November 2025/ 4 Jumadil Akhir 1447 H
2	Pemeriksaan	Bd. Nur Chabibah, S.Keb., MPH	Kepala LPM		4 Desemeber 2025/ 13 Jumadil Akhir 1447 H
3	Persetujuan	Dr. Imam Suradji, M.Ag	Ketua BPH		8 Desember 2025/ 17 Jumadil Akhir 1447 H
4	Pertimbangan	Dr. Nur Izzah., SKp., MKes	Senat		8 Desember 2025/ 17 Jumadil Akhir 1447 H
5	Penetapan	Dr. Nur Izzah., SKp., MKes	Rektor		9 Desember 2025/ 18 Jumadil Akhir 1447 H
6	Pengendalian	Bdn. Wahyu Ersila, SST., MPH	Sekretaris LPM		9 Desember 2025/ 18 Jumadil Akhir 1447 H



CATATAN REVISI		
No.	Tanggal	Revisi/Perubahan
1	15 September 2020 (R1)	Penyesuain dengan SPMI UMPP dengan SPMI Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisiyah
2	30 September 2021 (R2)	Penambahan subtansial dengan delapan (8) Indikator kinerja utama (IKU) Kementrian Pendidikan tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia
3	14 Februari 2025 (R3)	1. Penyesuain dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 tahun 2023 2. Penyesuaian Intrumen akreditasi delapan (8) kriteria Badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi dan Lembaga akreditasi Mandiri
4	9 Desember 2025 (R4)	1. Penyesuaian dengan Penyesuain dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025 2. Penyesuaian dengan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Berdampak Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Tinggi Tahun 2025



1. Daftar Istilah

- a. **Standar pengelolaan keuangan** merupakan kriteria minimal dalam perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
- b. **Perencanaan anggaran** digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama 1 tahun.
- c. **Sistem anggaran berbasis kinerja** merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input), proses, dan output, serta outcome atas pencapaian target kinerja.
- d. **Input** adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggungjawabannya oleh setiap lini fungsi organisasi perguruan tinggi.
- e. **Proses terkait dengan sistem anggaran UMPP** merupakan prosedur yang mengatur penyusunan calon anggaran yang dimulai dari penyusunan calon rancangan anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja UMPP yang telah disahkan.
- f. **Output** berupa laporan keuangan dan akuntansi keuangan UMPP yang ditujukan pada Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
- g. **Outcome** merupakan peningkatan kinerja anggaran UMPP untuk membiayai penyelenggaraan organisasi UMPP.
- h. **Anggaran berfungsi** sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan UMPP pada waktu yang akan datang.
- i. **Anggaran sebagai alat koordinasi kerja**, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam UMPP memungkinkan bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerja sama.
- j. **Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian anggaran** berfungsi sebagai tolok ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan UMPP pada masa yang akan datang.
- k. **Mekanisme pengelolaan keuangan UMPP** dikelola oleh pimpinan perguruan tinggi.
- l. **Pengelolaan keuangan UMPP** digunakan untuk membiayai kegiatan Catur Dharma UMPP dan Tata Kelola UMPP.

2. Rationale

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, mewajibkan institusi untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta tata kelola UMPP. Pengelolaan dana sangat penting bagi keberlangsungan UMPP. Oleh karena itu diperlukan sistem anggaran UMPP yang merupakan prosedur yang mengatur penyusunan anggaran yang dimulai dari penyusunan Calon Rencana Anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja UMPP yang telah disahkan.



3. Isi Standar

- m. Rektor UMPP menentukan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan UMPP.
- n. Rektor UMPP menetapkan Tim Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tingkat Unit Kerja.
- o. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) mengupayakan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tingkat Rektorat/ Pimpinan UMPP.
- p. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) menentukan Revisi berdasarkan *nego costing* dan *nego activitis* terhadap Tim Anggaran UMPP dan penetapan hasil revisi.
- q. Rektor UMPP mengajukan Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan(Diktilitbang) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
- r. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) menyusun SOP pengelolaan keuangan.
- s. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) mendistribusikan anggaran yang telah disahkan oleh Majelis dikti Litbang kepada masing-masing unit kerja hasil penjabaran (*breakdown*) RAPB UMPP.
- t. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) harus memberikan laporan penggunaan RAPB UMPP ke Badan Pembina harian sebagai wakil dari Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
- u. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) harus mengupayakan memiliki Satuan Pengawas Internal.
- v. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) harus mengupayakan untuk dilakukan audit eksternal secara berkala yang dilakukan terhadap Badan Penyelenggara oleh kantor Akuntan Publik.
- w. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) harus mengupayakan adanya lembaga audit keuangan eksternal yang kredibel dan bereputasi.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor menyusun kebijakan pengelolaan keuangan UMPP.
- b. Wakil Rektor UMPP menyusun pedoman pengelolaan keuangan.
- c. Rektor dan Wakil Rektor melakukan sosialisasi standar, mengawasi, dan mengevaluasi pengelolaan keuangan UMPP.
- d. Rektor dan Wakil Rektor II merancang kebijakan untuk meningkatkan pemasukkan keuangan dari berbagai sumber diantaranya melalui kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah.



5. Indikator Pencapaian

a. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
1	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	$PDM \leq 75\%$ $PDM = (DM / DT) \times 100\%$ DM = Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.	Risiko: Tingginya persentase dana yang bersumber dari mahasiswa ($PDM > 75\%$) Akar penyebab: Ketergantungan pada SPP/pendaftaran mahasiswa karena minimnya sumber dana alternatif	Kestabilan keuangan perguruan tinggi terganggu; risiko pembatasan kualitas layanan pendidikan; reputasi menurun	1. Diversifikasi sumber dana (hibah penelitian, kerja sama industri, donasi alumni) 2. Meningkatkan layanan pendidikan untuk menarik dana dari riset atau proyek kemitraan	WR II	Laporan keuangan 3 tahun terakhir, laporan penerimaan dana menurut sumber, rencana strategis pendanaan
2	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	$PDL \geq 10\%$ $PDL = (DK / DT) \times 100\%$ DL = Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.	Risiko: Rendahnya persentase dana yang bersumber dari pihak lain ($PDL < 10\%$) Akar penyebab: Minimnya diversifikasi sumber dana; kurangnya program fundraising; keterbatasan jaringan kerja sama dengan industri,	Ketergantungan tinggi pada dana mahasiswa dan kementerian/lembaga; risiko stabilitas keuangan; keterbatasan dana untuk proyek pengembangan dan penelitian	1. Mengembangkan dan atau mendirikan program kerjasama dengan industri, lembaga swasta, dan alumni 2. Membuka peluang pendanaan eksternal melalui hibah, proyek penelitian, atau donasi	WR II, Wadep II	Laporan keuangan 3 tahun terakhir, kontrak kerjasama, laporan donasi/alumni, rencana strategis pendanaan



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
		DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.	lembaga swasta, dan alumni		3. Membentuk unit fundraising khusus		
3	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun.	$DOM \geq 15 \text{ Juta}$ $DOM = DOP / NMDOP = \text{Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah)}.$ $NM = \text{Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS}.$	Risiko: Rendahnya dana operasional per mahasiswa ($DOM < 15 \text{ Juta}$) Akar penyebab: Dana operasional perguruan tinggi terbatas; jumlah mahasiswa meningkat tanpa peningkatan DOP; alokasi dana tidak efisien	Kualitas proses pembelajaran menurun; fasilitas pendidikan terbatas; beban biaya per mahasiswa meningkat	1. Evaluasi dan efisiensi alokasi dana operasional 2. Peningkatan pendanaan dari sumber eksternal (hibah, kerjasama industri) 3. Monitoring dan perencanaan kebutuhan DOP tahunan	WR I, WR II, Wadek I	Laporan keuangan 3 tahun terakhir, data jumlah mahasiswa aktif, laporan alokasi dana operasional



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
4	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	$DPD \geq 10$ juta $DPD = DP / 3 / NDT$ DP = Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap.	Risiko: Rendahnya dana penelitian per dosen ($DPD < 10$ Juta) Akar penyebab: belum optimal terkait dukungan internal, dosen kurang aktif mengajukan penelitian	Produktivitas penelitian menurun; kualitas publikasi dan inovasi terbatas; reputasi perguruan tinggi menurun	1. Meningkatkan peluang pendanaan penelitian (hibah nasional/internasional) 2. Memberikan insentif dan pendampingan proposal penelitian 3. Memfasilitasi kolaborasi penelitian antar dosen dan institusi	WR II, Wadek II, LPPM	Laporan dana penelitian 3 tahun terakhir, daftar proposal dan hibah yang disetujui, laporan publikasi
5	Rata-rata dana PkM dosen/ tahun.	$DPkMD \geq 5$ Juta $DPkMD = DPkM / 3 / NDT$ DPkM = Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap.	Risiko: Rendahnya dana PkM per dosen ($DPkMD < 5$ Juta) Akar penyebab: dosen kurang aktif mengajukan proposal, belum optimal terkait dukungan internal	Produktivitas PkM menurun; dampak pengabdian masyarakat terbatas; reputasi perguruan tinggi menurun	1. Meningkatkan peluang pendanaan PkM (hibah nasional/internasional) 2. Memberikan insentif dan pendampingan proposal PkM 3. Memfasilitasi kolaborasi PkM antar dosen dan institusi	WR II, Wadek II, LPPM	Laporan dana PkM 3 tahun terakhir, daftar proposal dan hibah yang disetujui, laporan kegiatan PkM



No	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
6	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	$PDP \geq 4\%$ $PDP = (DP / DT) \times 100\%$ DP = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.	Risiko: Persentase penggunaan dana penelitian rendah ($PDP < 4\%$) Akar penyebab: Dana penelitian terbatas; prioritas penggunaan dana lebih besar untuk operasional dan infrastruktur; minimnya perencanaan anggaran untuk penelitian	Rendahnya output penelitian; kualitas akademik dan publikasi menurun; reputasi perguruan tinggi berkurang	1. Menetapkan alokasi anggaran minimal untuk penelitian setiap tahun 2. Perencanaan anggaran berbasis target penelitian 3. Mendorong dosen mengajukan proposal penelitian yang didanai internal	WR II, Wadek II, LPPM	Laporan penggunaan dana 3 tahun terakhir, RKA dan realisasi anggaran, laporan kegiatan penelitian
7	Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.	$PDPkM \geq 1\%$ $PDPkM = (DPkM / DT) \times 100\%$ DPkM = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan PkM dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.	Risiko: Persentase penggunaan dana PkM rendah ($PDPkM < 1\%$) Akar penyebab: Dana PkM terbatas; prioritas anggaran lebih besar untuk operasional dan infrastruktur; kurangnya perencanaan anggaran PkM	Rendahnya output PkM; dampak pengabdian masyarakat terbatas; reputasi perguruan tinggi menurun	1. Menetapkan alokasi anggaran minimal untuk PkM setiap tahun 2. Perencanaan anggaran berbasis target PkM 3. Mendorong dosen mengajukan proposal PkM yang didanai internal	WR II, Wadek II, LPPM	Laporan penggunaan dana 3 tahun terakhir, RKA dan realisasi anggaran, laporan kegiatan PkM



b. Indikator Kinerja Tambahan

No	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
1	Kinerja Operasi: a. Biaya Rata-Rata Per Mahasiswa b. Rasio Pendapatan Kegiatan Usaha c. Rasio Beban tetap, Beban Hutang dibanding pendapatan	DOP $\geq$ 11,7 juta 1: 30 1:15	• Biaya operasional tinggi karena belum optimalnya efisiensi biaya dan masih adanya pemborosan anggaran. • Pendapatan kegiatan usaha rendah akibat minimnya diversifikasi usaha, kurang promosi, dan belum maksimalnya kinerja unit usaha. • Rasio beban tetap dan hutang tinggi • Ketergantungan pada pendapatan utama (SPP/UKT) sehingga rentan terhadap fluktuasi jumlah mahasiswa.	• Tidak tercapainya target biaya operasional per mahasiswa. • Penurunan kinerja keuangan institusi. • Terhambatnya pendanaan kegiatan prioritas universitas. • Potensi defisit anggaran dan risiko ketahanan finansial jangka panjang.	• Meningkatkan animo mahasiswa untuk pertambahan jumlah mahasiswa • Melakukan audit biaya rutin untuk menemukan pemborosan dan meningkatkan efisiensi operasional. • Mengembangkan diversifikasi sumber pendapatan melalui penguatan unit usaha dan optimalisasi aset universitas. • Meningkatkan kapasitas SDM unit usaha melalui pelatihan manajemen bisnis dan pemasaran. • Melakukan evaluasi dan pengendalian ketat pada perencanaan investasi dan pengelolaan hutang. • Mengimplementasikan	• Wakil Rektor II • Biro Keuangan	• Laporan Keuangan Tahunan • Laporan Audit SPI • RKA dan Realisasi Anggaran • Laporan Kinerja Unit Usaha • Dokumen Perencanaan Investasi dan Analisis Kelayakan



No	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
					n anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting).		
2	Persentase penganggaran unit bisnis penunjang operasional UMPP selain dana dari mahasiswa	3%	Persentase penganggaran unit bisnis penunjang operasional UMPP selain dana mahasiswa rendah (<3%) Akar penyebab: Kurangnya strategi pengembangan unit bisnis, minimnya promosi/marketing, keterbatasan SDM yang kompeten untuk mengelola unit bisnis, tidak ada kebijakan diversifikasi sumber dana	Ketergantungan tinggi pada dana mahasiswa; risiko keuangan unit bisnis tidak stabil; pengembangan unit bisnis tertunda; potensi layanan operasional UMPP terbatas	1. Menyusun strategi diversifikasi pendapatan unit bisnis. 2. Melakukan promosi dan pengembangan produk/jasa unit bisnis. 3. Pelatihan SDM unit bisnis. 4. Evaluasi dan monitoring berkala kinerja unit bisnis	Kepala Unit Bisnis Penunjang, Kepala Biro Keuangan, Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan	Laporan keuangan unit bisnis, rencana strategi unit bisnis, laporan promosi/marketing, dokumen evaluasi kinerja unit bisnis
3	Persentase perolehan dana hibah penelitian eksternal dari total dana penelitian/tahun	Internasional : $\geq 3\%$ Nasional: $\geq 4\%$ Lokal: $\geq 5\%$	Persentase perolehan dana hibah penelitian eksternal rendah: Internasional $\leq 3\%$, Nasional $\leq 4\%$, Lokal $\leq 5\%$ Akar penyebab: Kurangnya pengalaman dosen dalam mengajukan	Dana penelitian eksternal terbatas, ketergantungan tinggi pada dana internal; peluang penelitian unggulan dan publikasi internasional berkurang; reputasi perguruan tinggi menurun	1. Pelatihan penyusunan proposal penelitian untuk dosen. 2. Pendampingan dan mentoring proposal oleh dosen yang kompeten. 3. Meningkatkan	Kepala Lembaga Penelitian, Kepala Unit Hibah Penelitian, Wakil Rektor Bidang Penelitian dan	Daftar proposal hibah yang diajukan, daftar hibah yang disetujui, laporan pelatihan proposal, kontrak kerjasama penelitian, laporan realisasi dana



No	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			proposal, minimnya informasi peluang hibah, rendahnya kemampuan penulisan proposal, kurangnya kolaborasi dengan institusi lain, minimnya dukungan administratif		jejaring dan kerja sama dengan lembaga penelitian nasional dan internasional. 4. Membuat unit informasi dan konsultasi hibah penelitian. 5. Menyediakan dukungan administrasi untuk pengajuan hibah.	Pengabdian Masyarakat	hibah
4	Persentase perolehan dana hibah PkM eksternal.	Internasional : $\geq 1\%$ Nasional: $\geq 30\%$ Lokal: $\geq 20\%$	Persentase perolehan dana hibah PkM eksternal rendah: Internasional $\leq 1\%$, Nasional $\leq 30\%$, Lokal $\leq 20\%$ Akar penyebab: Minimnya pengalaman dosen dalam mengajukan hibah PkM, terbatasnya informasi peluang hibah, rendahnya kemampuan penulisan proposal, kurangnya kolaborasi dengan mitra eksternal,	Dana PkM eksternal terbatas; ketergantungan tinggi pada dana internal; dampak PkM ke masyarakat berkurang; reputasi perguruan tinggi dalam pengabdian masyarakat menurun	1. Pelatihan penyusunan proposal PkM untuk dosen. 2. Pendampingan dan mentoring proposal oleh dosen yang berkompeten. 3. Meningkatkan jejaring dan kerja sama dengan lembaga eksternal. 4. Membuat unit	Kepala Lembaga Penelitian & PkM, Kepala Unit Hibah PkM, Warek 1	Daftar proposal hibah PkM yang diajukan, daftar hibah disetujui, laporan pelatihan proposal PkM, kontrak kerja sama PkM, laporan realisasi dana hibah PkM



No	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			dukungan administratif terbatas		informasi dan konsultasi hibah PkM. 5. Menyediakan dukungan administratif untuk pengajuan hibah.		
5	Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana penelitian dari total dana penelitian	$\geq 20\%$	Persentase dana untuk peningkatan kapasitas pelaksana penelitian rendah (<20%) Akar penyebab: Kurangnya alokasi anggaran untuk pelatihan dan workshop, minimnya program pengembangan kompetensi, kurangnya kesadaran pimpinan/unit tentang pentingnya peningkatan kapasitas, tidak ada monitoring penggunaan dana	Kompetensi dosen/peneliti tidak berkembang; kualitas proposal dan hasil penelitian menurun; produktivitas penelitian rendah; reputasi perguruan tinggi menurun	1. Menetapkan minimal alokasi 20% dana penelitian untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas. 2. Menyusun program pengembangan kompetensi dosen/peneliti (workshop, pelatihan, mentoring). 3. Monitoring dan evaluasi berkala penggunaan dana.	Ka LPPM , Warek 1	Dokumen anggaran dan realisasi dana penelitian, daftar kegiatan pelatihan/mentoring, laporan evaluasi kompetensi peneliti, laporan penggunaan dana
6	Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM dari	$\geq 20\%$	Persentase dana untuk peningkatan kapasitas pelaksana PkM rendah (<20%) Akar penyebab: Kurangnya alokasi	Kompetensi dosen/peneliti PkM tidak berkembang; kualitas program PkM menurun; dampak pengabdian masyarakat	1. Menetapkan minimal alokasi 20% dana PkM untuk pelatihan dan pengembangan	Kepala Lembaga Penelitian & PkM, Kepala Unit Pengembangan	Dokumen anggaran dan realisasi dana PkM, daftar kegiatan pelatihan/mentoring



No	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	total dana PkM		anggaran untuk pelatihan PkM, minimnya program pengembangan kapasitas, tidak adanya monitoring penggunaan dana, rendahnya kesadaran pimpinan/unit tentang pentingnya peningkatan kapasitas	berkurang; reputasi perguruan tinggi dalam PkM menurun	kapasitas. 2. Menyusun program pengembangan kompetensi dosen/peneliti PkM (workshop, mentoring, pelatihan). 3. Monitoring dan evaluasi berkala penggunaan dana.	Kapasitas PkM, Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	g PkM, laporan evaluasi kompetensi pelaksana PkM, laporan penggunaan dana
7	Insentif publikasi artikel penelitian dan PkMdosen dan mahasiswa UMPP	UMPP menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan kemampuan dan tingkat reputasi publikasi. (SK)	Insentif publikasi tidak tersedia atau tidak sesuai ketentuan Akar penyebab: Tidak adanya regulasi jelas, anggaran terbatas, mekanisme distribusi insentif belum terstruktur, kurangnya sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa	Motivasi dosen dan mahasiswa menurun dalam melakukan penelitian dan PkM; jumlah publikasi menurun; reputasi institusi di tingkat nasional/internasional menurun	1. Menyusun SK dan regulasi pemberian insentif publikasi sesuai tingkat reputasi jurnal. 2. Menyediakan anggaran khusus insentif publikasi. 3. Sosialisasi mekanisme insentif ke dosen dan mahasiswa. 4. Monitoring dan evaluasi distribusi insentif	Kepala Lembaga Penelitian & PkM, Kepala Biro Keuangan, Wakil rektor bidang akademik, wakil rektor bidang keuangan	SK pemberian insentif, laporan anggaran insentif, daftar penerima insentif, laporan evaluasi distribusi insentif, bukti pembayaran insentif



No	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
8	Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Publikasi	5%	Persentase kontribusi penelitian, PkM, dan publikasi rendah (<5%) Akar penyebab: Minimnya pendanaan internal dan eksternal, beban mengajar tinggi, kurangnya motivasi atau insentif publikasi, SDM belum terlatih optimal, minimnya kolaborasi penelitian	Produktivitas penelitian dan PkM rendah; jumlah publikasi menurun; dampak pengabdian masyarakat terbatas; reputasi perguruan tinggi menurun; peringkat institusi di tingkat nasional/internasional tidak optimal	1. Memberikan insentif publikasi sesuai reputasi jurnal dan kontribusi PkM. 2. Pelatihan dan mentoring penelitian/PkM. 3. Dukungan pendanaan internal/eksternal. 4. Monitoring dan evaluasi capaian penelitian, PkM, dan publikasi. 5. Promosi kolaborasi penelitian dan PkM antar-dosen, antar-fakultas, dan dengan mitra eksternal	Kepala Lembaga Penelitian & PkM, Kepala Unit Publikasi, Wakil Rektor bidang akademik dan keuangan	Laporan penelitian dan PkM, daftar publikasi, laporan realisasi insentif, dokumen evaluasi capaian penelitian/PkM/publikasi, kontrak kerja sama penelitian
9	Gaji pokok sesuai standar PNS	100% PNS tahun 2019	Gaji pokok pegawai belum mengikuti dasar PNS Akar penyebab: Kemampuan keuangan universitas yang belum mencukupi, administrasi penggajian, keterlambatan SK pengangkatan atau	Pegawai menerima gaji tidak sesuai standar; menurunnya motivasi dan kepuasan kerja; risiko ketidakpatuhan terhadap regulasi pemerintah	1. Memastikan seluruh SK pegawai dan dokumen pendukung lengkap dan ter-update. 2. Memastikan sistem penggajian terintegrasi	Kepala Biro Umum & Kepegawaian, Kepala Biro Keuangan, Wakil Rektor Bidang keuangan dan SDM	Daftar pegawai, SK pengangkatan/kenaikan pangkat, slip gaji, laporan audit penggajian, dokumen sistem penggajian



No	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			penyesuaian pangkat/golongan, sistem penggajian tidak terintegrasi		dengan data kepegawaian. 3. Audit rutin penggajian pegawai.		
10	Investasi Sarana dan Prasarana dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	10%	Investasi sarana dan prasarana rendah (<10%) Akar penyebab: Anggaran terbatas, prioritas alokasi dana lebih pada operasional rutin, perencanaan investasi kurang matang, prosedur pengadaan lama	Beberapa fasilitas sarana dan prasarana kurang memadai; kualitas layanan akademik dan operasional menurun; kepuasan mahasiswa/staff berkurang; menghambat akreditasi dan pengembangan institusi	1. Menyusun rencana investasi sarana dan prasarana 3 tahun ke depan. 2. Alokasi anggaran minimal 10% untuk investasi. 3. Mempercepat proses pengadaan dan perencanaan. 4. Monitoring dan evaluasi realisasi investasi	Kepala Biro Umum & Kepegawaian, Kepala Biro Keuangan, Wakil Rektor Bidang keuangan dan SDM	Dokumen Rencana Anggaran Investasi, Laporan realisasi investasi 3 tahun terakhir, dokumen pengadaan sarana/prasarana, laporan evaluasi fasilitas
11	Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 3 (tiga) tahun terakhir berorientasi masa depan.	8%	Investasi TIK dan SDM rendah (<8%) Akar penyebab: Anggaran terbatas, prioritas alokasi dana lebih pada operasional rutin, perencanaan investasi TIK dan SDM belum matang, kurangnya kebijakan strategis	Infrastruktur TIK tidak memadai, kompetensi SDM (dosen, tendik, mahasiswa, alumni) tidak berkembang optimal, integrasi sistem dan layanan akademik terganggu, reputasi institusi menurun, kesiapan	1. Menyusun rencana investasi TIK dan SDM 3 tahun ke depan berbasis strategi masa depan. 2. Alokasi anggaran minimal 8% untuk investasi TIK dan SDM.	PUSDATIN, Kepala Biro SDM & Kepegawaian, Kepala Biro Keuangan, Wakil Rektor Bidang keuangan dan SDM	Dokumen rencana investasi TIK dan SDM, laporan realisasi investasi 3 tahun terakhir, laporan pelatihan dan pengembangan SDM, dokumen evaluasi kesiapan TIK dan SDM,



No	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			berbasis masa depan, Pengguna belum secara optimal dalam menggunakan sistem	digitalisasi terbatas	3. Pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM secara berkala. 4. Monitoring dan evaluasi realisasi investasi.		laporan integrasi sistem
12	Investasi SDM Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	20%	Persentase investasi SDM rendah (<20%) Akar penyebab: Anggaran terbatas, kurangnya perencanaan pengembangan SDM, prioritas dana lebih pada operasional rutin, minimnya program pelatihan dan sertifikasi untuk dosen, tendik, mahasiswa, dan alumni	Kompetensi SDM tidak optimal; kualitas pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat menurun; peluang pengembangan karir SDM terbatas; reputasi institusi menurun	1. Menetapkan alokasi minimal 20% dana untuk pengembangan SDM. 2. Menyusun program pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi dosen, tendik, mahasiswa, dan alumni 3. Monitoring dan evaluasi realisasi investasi SDM secara berkala. 4. Pelatihan berbasis kebutuhan dan roadmap pengembangan SDM	Kepala Biro SDM & Kepegawaian, Kepala Lembaga Penelitian & PkM, Kepala Biro Akademik, Wakil Rektor Bidang Akademik & SDM	Dokumen anggaran dan realisasi investasi SDM, laporan kegiatan pelatihan/sertifikasi, laporan evaluasi kompetensi SDM, dokumen roadmap pengembangan SDM, daftar peserta pelatihan



No	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
13	Persentase anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum dan pengembangan suasana akademik.	30%	Persentase anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum, dan suasana akademik rendah (<30%) Akar penyebab: Alokasi anggaran lebih difokuskan pada operasional rutin, perencanaan anggaran kurang matang, kurangnya prioritas terhadap pengembangan akademik	Kualitas pendidikan dan pengajaran menurun; kurikulum tidak berkembang sesuai kebutuhan; suasana akademik kurang mendukung pembelajaran; daya saing perguruan tinggi menurun	1. Menetapkan alokasi minimal 30% anggaran untuk pendidikan, kurikulum, dan suasana akademik. 2. Menyusun rencana pengembangan kurikulum dan suasana akademik berbasis roadmap. 3. Monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran secara berkala.	Kepala Biro Akademik, Kepala Biro Keuangan, Wakil Rektor akademik, bidang keuangan dan SDM	Dokumen Rencana Anggaran, laporan realisasi anggaran pendidikan dan pengajaran, dokumen pengembangan kurikulum, laporan evaluasi suasana akademik, notulen rapat alokasi anggaran
14	Persentase anggaran untuk AIK	5%	Persentase anggaran untuk AIK rendah (<5%) Akar penyebab: Alokasi anggaran lebih banyak ke operasional rutin atau program akademik lain, perencanaan anggaran tidak optimal, kurangnya koordinasi antar unit terkait AIK	Pelayanan administrasi dan kemahasiswaan kurang optimal; fasilitas infrastruktur belum memadai; kualitas layanan mahasiswa menurun; potensi keluhan mahasiswa meningkat	1. Menetapkan alokasi minimal 5% anggaran untuk AIK. 2. Menyusun rencana prioritas pengeluaran AIK berdasarkan kebutuhan strategis. 3. Monitoring dan evaluasi realisasi	Kepala Biro Akademik, Kepala Biro Keuangan, Wakil Rektor akademik, bidang keuangan dan SDM	Dokumen Rencana Anggaran AIK, laporan realisasi anggaran AIK, dokumen evaluasi layanan administrasi dan kemahasiswaan, notulen rapat alokasi anggaran



No	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
					anggaran secara berkala.		
15	Persentase Tata Kelola kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama	7%	Persentase alokasi untuk tata kelola kelembagaan, penjaminan mutu, dan kerjasama rendah (<5%) Akar penyebab: Minimnya anggaran dan prioritas terhadap kegiatan operasional rutin, kurangnya pemahaman staf/unit terkait pentingnya tata kelola dan mutu, koordinasi antar unit kurang optimal	Tata kelola kelembagaan dan penjaminan mutu tidak optimal; kerjasama dengan pihak eksternal terbatas; risiko ketidakpatuhan terhadap standar SPMI dan regulasi meningkat; reputasi perguruan tinggi menurun	1. Menetapkan alokasi minimal 5% anggaran untuk tata kelola kelembagaan, penjaminan mutu, dan kerjasama. 2. Menyusun rencana kerja dan SOP untuk penjaminan mutu dan kerjasama. 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala. 5. 4. Sosialisasi pentingnya tata kelola dan penjaminan mutu ke seluruh unit	Kepala Biro Administrasi, Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal, Kepala Biro Kerjasama, Wakil Rektor Bidang Administrasi & Akademik	Dokumen Rencana Anggaran, laporan realisasi anggaran, SOP penjaminan mutu, laporan kerjasama, notulen rapat evaluasi kelembagaan dan mutu
16	Persentase Promosi	3%	Persentase promosi rendah (<3%) Akar penyebab: Minimnya strategi dan anggaran promosi,	Citra dan branding perguruan tinggi kurang optimal; jumlah calon mahasiswa baru menurun; kompetisi	1. Menyusun strategi promosi dengan target dan timeline jelas. 2. Menyediakan	Kepala Biro Humas & Promosi, Kepala Biro Humas dan	Dokumen Rencana Strategi Promosi, laporan realisasi anggaran promosi, laporan efektivitas



No	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			kurangnya tim atau SDM khusus untuk promosi, materi promosi tidak menarik, kurangnya evaluasi efektivitas promosi	dengan institusi lain meningkat; target publikasi dan pengenalan program studi tidak tercapai	anggaran khusus untuk promosi. 3. Membentuk tim promosi yang kompeten 4. Evaluasi efektivitas promosi secara berkala dan perbaikan materi promosi	kesekretiratan, ka biro PMB dan tracherstudy, Keuangan, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil rektor Bidang ekuangan dan SDM	promosi, materi promosi (brosur, media sosial, video), notulen rapat evaluasi promosi
17	Persentase penganggaran program Internasionalisasi	3%	Persentase anggaran untuk program internasionalisasi rendah (<3%) Akar penyebab: Anggaran terbatas, prioritas lebih pada program internal, kurangnya strategi pengembangan program internasional, koordinasi dengan pihak internasional kurang optimal	Peluang kolaborasi dan pertukaran internasional terbatas; reputasi perguruan tinggi di tingkat global rendah; target internasionalisasi tidak tercapai	1. Menetapkan alokasi minimal 3% anggaran untuk program internasionalisasi. 2. Menyusun rencana strategis internasionalisasi perguruan tinggi. 3. Meningkatkan jejaring dan kerjasama internasional. 4. Monitoring dan evaluasi program internasionalisasi	Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional, Kepala Biro Keuangan, Wakil Rektor Bidang Akademik & Kerjasama	Dokumen Rencana Anggaran Internasionalisasi, laporan realisasi anggaran, laporan kegiatan internasionalisasi, kontrak kerjasama internasional, notulen rapat evaluasi program internasionalisasi



No	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
					secara berkala		
18	Laporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan/tahun lengkap	Laporan keuangan lengkap namun terlambat Akar penyebab: Sistem pengelolaan keuangan kurang terintegrasi, SDM keuangan kurang kompeten, prosedur pelaporan belum baku, keterlambatan input data transaksi	Tidak memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi; risiko audit negatif; keputusan manajemen berbasis data keuangan menjadi kurang akurat; reputasi perguruan tinggi menurun	1. Menyusun SOP pelaporan keuangan tahunan. 2. Menyediakan sistem pengelolaan keuangan terintegrasi. 3. Pelatihan SDM keuangan terkait pelaporan dan akuntansi. 4. 4. Monitoring dan review laporan keuangan secara berkala	Kepala Biro Keuangan, Wakil Rektor Bidang Administrasi & Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan tahunan, laporan audit internal/eksternal, SOP pelaporan keuangan, log input data transaksi, notulen rapat evaluasi keuangan
19	Laporan Monev Internal oleh satuan pengawas internal	Dokumen hasil monev internal/semester lengkap Terdapat identifikasi permasalahan dan menetapkan peluang untuk perbaikan dan menerapkan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan	Laporan monev internal tidak lengkap atau tidak tepat waktu Akar penyebab: Kurangnya SDM yang kompeten di unit pengawas internal, prosedur monev tidak jelas, kurangnya koordinasi antar unit, keterbatasan sistem dokumentasi	Tidak teridentifikasinya permasalahan secara tepat, peluang perbaikan terlewat, kualitas pelayanan dan kepuasan pemangku kepentingan menurun, risiko ketidakpatuhan terhadap standar SPMI	1. Menyusun SOP monev internal yang jelas dan baku. 2. Pelatihan SDM pengawas internal terkait monev dan dokumentasi. 3. Monitoring dan review berkala hasil monev.	Kepala Satuan Pengawas Internal, Kepala Biro Administrasi, Wakil Rektor Bidang Penjaminan Mutu	Dokumen hasil monev internal tiap semester, laporan tindak lanjut perbaikan, SOP monev, notulen rapat evaluasi hasil monev, bukti implementasi tindakan



No	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
		kepuasan pemangku kepentingan			4. Implementasi sistem dokumentasi dan laporan terintegrasi		perbaikan
20	Laporan Audit Internal	Dokumen hasil Audit internal/tahun Lengkap, Terdapat identifikasi permasalahan dan menetapkan peluang untuk perbaikan dan menerapkan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan	Laporan audit internal tidak lengkap atau terlambat Akar penyebab: SDM audit kurang kompeten, prosedur audit tidak jelas, koordinasi antar unit terbatas, dokumentasi tidak terintegrasi	Permasalahan tidak teridentifikasi dengan baik, peluang perbaikan hilang, kualitas manajemen dan kepuasan pemangku kepentingan menurun, risiko ketidakpatuhan terhadap standar internal meningkat	1. Menyusun SOP audit internal yang jelas dan baku. 2. Pelatihan SDM audit internal terkait metodologi audit dan dokumentasi. 3. Monitoring dan review berkala hasil audit. 4. Implementasi sistem dokumentasi dan laporan audit terintegrasi	Kepala Unit Audit Internal, Kepala Biro Administrasi, Wakil Rektor Bidang Penjaminan Mutu	Dokumen hasil audit internal tahunan, laporan tindak lanjut perbaikan, SOP audit internal, notulen rapat evaluasi hasil audit, bukti implementasi tindakan perbaikan
21	Laporan Audit Eksternal	Dokumen hasil Audit Eksternal/tahun lengkap Terdapat identifikasi permasalahan dan menetapkan peluang untuk perbaikan dan menerapkan tindakan yang diperlukan untuk	Laporan audit eksternal tidak lengkap atau terlambat Akar penyebab: Kurangnya koordinasi dengan pihak auditor eksternal, dokumen pendukung tidak lengkap, SDM internal kurang memahami prosedur audit eksternal	Permasalahan yang teridentifikasi tidak ditindaklanjuti, peluang perbaikan hilang, kepatuhan terhadap regulasi dan standar eksternal menurun, reputasi perguruan tinggi menurun	1. Menyediakan seluruh dokumen dan data yang diperlukan untuk audit eksternal. 2. Menyusun SOP koordinasi dengan auditor eksternal. 3. Pelatihan SDM terkait proses audit eksternal.	Kepala Biro Keuangan, Kepala Unit Audit Internal, Wakil Rektor Bidang Penjaminan Mutu	Dokumen hasil audit eksternal tahunan, laporan tindak lanjut perbaikan, notulen koordinasi audit, SOP permohonan audit eksternal, bukti implementasi



No	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
		memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan			4. Monitoring dan tindak lanjut hasil audit		perbaikan
22	Laporan Pengelolaan Aset	Dokumen kontrolinventarisasi aset/5 tahun lengkap Terdapat identifikasi permasalahan dan menetapkan peluang untuk perbaikan dan menerapkan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi perencanaan investasi jangka Panjang selanjutnya	Laporan pengelolaan aset tidak lengkap atau tidak akurat Akar penyebab: Sistem inventarisasi aset tidak terintegrasi, SDM kurang terlatih, data aset tidak diperbarui secara berkala, prosedur kontrol aset tidak jelas	Perencanaan investasi jangka panjang tidak optimal; aset tidak termanfaatkan secara maksimal; risiko kehilangan atau kerusakan aset meningkat; akuntabilitas aset menurun	1. Menyusun SOP pengelolaan dan inventarisasi aset. Menyediakan sistem inventarisasi aset yang terintegrasi. 2. Pelatihan SDM terkait pengelolaan aset. 3. Monitoring dan review berkala terhadap laporan aset	Kepala Biro administrasiU mum & kepegawaian, Kepala Biro Keuangan, Wakil Rektor Bidang Administrasi & Keuangan	Dokumen kontrol/inventarisasi aset 5 tahun terakhir, laporan evaluasi aset, SOP pengelolaan aset, notulen rapat evaluasi aset, bukti tindakan perbaikan atau pemeliharaan aset



6. Pihak yang terlibat

- a. Pimpinan BPH
- b. Rektor
- c. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana)
- d. Pengelola Keuangan UMPP

7. Dokumen yang terkait

- a. Renstra UMPP
- b. Pedoman Keuangan UMPP
- c. Panduan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM
- d. SOP Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM

8. Referensi

- a. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Permendikbud No. 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Permentistekdikti No 50 Tahun 2018 Perubahan atas Pemenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- j. Pedoman SPMI 4.0 PTMA 2019, Majelis Diktilitbang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- k. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- l. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018.
- m. Panduan Pengelolaan Keuangan UMPP berdasar SK. No: 018/KEP/1.3/D/2018.
- n. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Laporan Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah
- o. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025



- p. Indikator Kinerja Utama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Berdampak Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Tinggi Tahun 2025





**Universitas Muhammadiyah
Pekajangan Pekalongan**